

FRANZ MAGNIS-SUSENO

PERAN AGAMA SEBAGAI PENDORONG PROSES TRANSFORMASI MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI

PENGANTAR

Pokok bahasan ini dapat didekati dari pelbagai sudut. Misalnya dari sudut politis-pragmatis: Bertolak dari tujuan nasional untuk menginisiasikan dan meneruskan proses transformasi masyarakat, dengan memperhatikan betapa besar pengaruh agama atas sikap masyarakat, tentu peran itu masuk akal dipertanyakan, dengan tujuan untuk mengoptimalkannya.

Dapat juga didekati dari sudut agamawan: Agama mengungkapkan keterlibatan hatinya yang sangat mendalam; sebagai itu ia mempertanyakan bagaimana agama berhadapan dengan proses modernisasi masyarakat ke arah perekonomian yang mandiri.

Tetapi barangkali pendekatan yang tepat adalah yang di tengah: Kita meminati dua-duanya, ya agama, ya kemajuan bangsa, di mana kita juga meyakini bahwa bangsa Indonesia tidak bisa maju, kalau perekonomian tidak maju juga. Lalu kita bertanya bagaimana agama dapat menjadi pendorong pada cita-cita kita untuk memajukan masyarakat, termasuk dalam mengembangkan ekonomi yang mandiri.

PEREKONOMIAN YANG MANDIRI: SEGI KEMAJUAN

Tetapi langsung muncul pertanyaan: Masyarakat yang mana yang dapat disebut maju? Kiranya tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar, bahwa "maju" dalam arti yang sebenarnya bukan asal menjadi modern (yang tidak mau saya definisikan di sini). Melainkan maju berarti: sekurang-kurangnya mempertahankan kualitas kehidupan masyarakat dan sedapat-dapatnya meningkatkannya.

Jadi sudah jelas: Meskipun agama tidak anti-ekonomi, titik tolaknya bukan kemajuan ekonomi, melainkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang mana yang berkualitas?

Kiranya kehidupan masyarakat dan anggota-anggotanya semakin berkualitas, semakin unsur-unsur berikut dinikmati: Kebebasan dari rasa takut, dari kekhawatiran akan hari esok, dari kemelaratan, dari penderitaan yang tidak perlu, dari perasaan tertindas atau terancam, dari kebingungan sosial;

apabila orang tidak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Secara positif: Apabila para warga masyarakat merasa aman, tenteram, selamat, bebas untuk hidup menurut cita-cita dan nilai-nilai komunitas mereka sendiri, sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia, bebas menghayati agamanya dalam kebersamaan umatnya, dan, sekarang, di zaman perubahan, juga kebebasan untuk bergerak, untuk mewujudkan kehidupan sesuai cita-citanya sendiri, jadi di mana kemampuan dan bahkan kreativitas anggota masyarakat bisa dikembangkan dalam kebersamaan positif, termasuk adanya kesempatan untuk, sesuai dengan kedudukan masing-masing, ikut dalam penentuan arah perjalanan bangsa, jadi untuk tidak hanya menjadi objek perencanaan orang lain.

Dan untuk merealisasikan kualitas hidup seperti itu, tentu perekonomian yang tangguh sangat perlu. Dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat yang bermutu, agama-agama juga mendukung pola pembangunan yang kondusif.

Tetapi sudah kelihatan satu hal: Agama tidak mendukung ekonomi asal ekonomi tumbuh, bahkan bukan asal negara mempunyai dasar ekonomis lebih tangguh, melainkan sejauh, dan supaya, manusia dalam masyarakat itu dapat berkembang secara utuh. Supaya ia dapat berkembang sesuai dengan martabat dan panggilannya sebagai manusia, dalam semua dimensinya.

Jadi ekonomi itu bukan tujuan, melainkan sarana. Tujuan adalah manusia yang utuh, utuh dalam pandangan agama-agama yang melihat manusia secara utuh, bukan hanya sebagai makhluk berkebutuhan di dunia, melainkan dengan dimensi panggilan transendennya.

AGAMA DAN ETIKA PEREKONOMIAN

Mari kita rangkum: Agama mendukung perkembangan ekonomis karena perkembangan itu salah satu syarat agar manusia berkembang sebagai manusia - sama seperti agama mendukung perkembangan kenegaraan, struktur-struktur sosial dan budaya dll. yang perlu agar manusia berkembang. Tetapi agama mendukung bidang ekonomi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah manusia dalam keutuhannya. Dengan lain kata, **agama mendukung perekonomian dari sudut etis.**

Itu berarti: **Agama tidak mengklaim** suatu keahlian atau wewenang dalam teknik pembangunan ekonomi makro maupun mikro. Menentukan **sistem perekonomian** mana yang paling kondusif, atau bidang- bidang mana yang harus diberi prioritas dsb. bukan urusan para agamawan. Agama juga tidak keberatan bahwa perekonomian adalah usaha dalam bidang fisik, karena agama memandang manusia dalam keutuhannya, sebagai makhluk rohani dan jasmani, dan memahami bahwa segenap kegiatan manusia, termasuk yang paling ro-

hani pun, mengandaikan sarana-sarana fisik: berdoa saja tidak bisa kalau orang begitu lapar sehingga ia pingsan. Bidang ekonomi yang bertugas untuk menjamin dasar-dasar fisik kehidupan manusia.

Maka agama tentu tidak anti ekonomi atau anti para ekonom. Namun yang dituntut oleh agama adalah bahwa pembangunan ekonomis kondusif terhadap perkembangan keutuhan warga masyarakat sebagai manusia. Secara singkat: pembangunan ekonomis itu perlu dan didukung, tetapi harus etis. Pembangunan ekonomis yang tidak sesuai dengan norma-norma etika, juga tidak sesuai dengan tujuannya, perkembangan manusia seutuhnya, dan oleh karena itu kontraproduktif dan merugikan.

Jadi dukungan agama terhadap kegiatan ekonomi tidak "tanpa reserve". Dukungan itu bersyarat. Syaratnya ialah etisnya pembangunan ekonomis.

Maka dukungan agama terhadap usaha di bidang ekonomi selalu kritis, dalam arti kata Yunani krisis yang sebenarnya: dengan membedakan. Bukan sembarang akumulasi kekayaan ekonomis didukung, melainkan akumulasi yang bersifat etis, yang mendukung keutuhan warga masyarakat dalam kemanusiaan.

ETIKA DALAM BIDANG EKONOMI

Bicara tentang etika perekonomian agama-agama perlu senantiasa memfokus pada intinya: dukungan terhadap keutuhan segenap warga masyarakat dalam kemanusiaan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan.

Hal itu berarti bahwa sebaiknya jangan terus hanya memperhatikan ada masalah maksiat atau tidak, meskipun tentu saja kita tidak mendukung pembangunan yang maksiat. Tetapi yang dituntut dari pembangunan ekonomis lebih daripada sekedar menghindari yang maksiat-maksiat. Yang dituntut agar pembangunan ekonomis menunjang manusia dalam keutuhannya. Kata etika harus diambil dalam arti yang sebenarnya: **Sebagai keseluruhan nilai dan norma yang menunjang keutuhan manusia sebagai manusia**. Kebaikan manusia sebagai manusia, itulah tujuan etika, itulah juga yang dititipkan Allah Pencipta kepada kita: Allahlah yang menciptakan manusia, maka manusia harus memperlakukan manusia sedemikian rupa hingga ia dapat mencapai keutuhannya yang hakiki, artinya, sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dapat dirumus sbb.:

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PEREKONOMIAN

Merumuskan prinsip-prinsip **etika perekonomian**, perlu beberapa hal diingat sebelumnya. **Pertama**, bahwa etika perekonomian dapat dirumuskan dari pelbagai sudut, menurut

pelbagai sistematika, dengan kadar keteruraian yang berbeda. Tak ada yang mempunyai monopoli perumusan sebuah etika.

Etika perekonomian bertanya bagaimana bidang perekonomian harus dibangun, agar segenap warga masyarakat dapat memperoleh sarana se-optimal mungkin untuk mewujudkan keutuhannya sebagai manusia, rohani-jasmani, individual-sosial, dalam dimensi dunia ini dan sekaligus menuju dunia akhirat.

Kedua, kepastian tentang prinsip-prinsip etika perekonomian hanya dapat dicari bersama. Kecuali beberapa prinsip paling dasar yang memang tidak kontrovers, selalu ada ruang untuk perbedaan pendapat. Untuk menemukan sebuah etika perekonomian nasional pencarian bersama diperlukan. Apalagi, dan itu catatan ketiga, masalah-masalah etis yang sebenarnya baru muncul apabila prinsip-prinsip dibawa ke lapangan. Bukan bahwa buruh berhak atas upah yang adil itulah yang kontrovers, melainkan apakah ia boleh mogok untuk memaksakan upah minimum 10.000 Rupiah sehari atau apabila ia boleh membentuk perwakilannya sendiri dsb.

Berikut ini saya membatasi diri pada penyajian lima prinsip yang sangat umum, yang barangkali membantu untuk seakan-akan menata segi-segi etis dalam bidang ekonomi.

1. Prinsip solidaritas.
2. Prinsip keadilan.
3. Prinsip hormat terhadap martabat manusia
4. Prinsip demokrasi.
5. Prinsip tanggungjawab.

1. PRINSIP SOLIDARITAS

Dalam UUD 1945 ditulis bahwa perekonomian kita disusun berdasar atas **asas kekeluargaan**. Hakekat hubungan dalam keluarga adalah solidaritas para anggota satu sama lain. Tanpa solidaritas semua keutamaan lain, misalnya keadilan, tidak mempunyai tempat berpijak. Solidaritas berarti bahwa semua bertanggungjawab atas semua, kesediaan untuk senasib sepenanggungan. Beberapa segi solidaritas sebagai dasar perekonomian etis:

- Solidaritas meluas dalam lingkaran-lingkaran: keluarga kecil, keluarga besar, lingkungan sosial, warga sesuku, sekelompok, seagama, anggota umat manusia.
- Dalam rangka perekonomian nasional solidaritas adalah solidaritas antara semua warga sebangsa, sebuah solidaritas yang tidak tertutup, melainkan terbuka bagi segenap anggota umat manusia -meskipun tanggungjawab pertama pada bangsa sendiri.

- Solidaritas menjadi nyata dalam sikap terhadap mereka yang lemah, yang tidak mempunyai kuasa, yang tidak dapat membalas kebaikan kita; jadi kenyataan kesosialan sebuah negara kelihatan dari bagaimana masyarakat dan pemerintah memperlakukan mereka yang lemah, miskin, kurang berdaya; solidaritas berarti bahwa yang didahulukan adalah mereka yang miskin: miskin secara ekonomis, miskin kuasa, miskin suara, miskin perwakilan.
- Solidaritas berarti bahwa pembangunan ekonomis secara nyata demi semua, dan bukan demi segelintir orang.
- Solidaritas menolak pembangunan dengan memakai tumbal, menolak bahwa mereka yang kecil, yang "tidak berarti", dikurbankan; misalnya, memindahkan orang kecil dari rumah, tanah atau ladangnya demi proyek dengan ganti rugi murahan adalah pukulan ke muka solidaritas.

2. PRINSIP KEADILAN

- Keadilan adalah prinsip dasar dalam menata masyarakat, prinsip dasar etika politik dalam arti luas.
- Keadilan mengakui kesamaan hakiki semua orang dalam harkat kemanusiaan dan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara.

- Keadilan berarti kewajiban perlakuan yang sama serta hormat terhadap hak dan taat terhadap kewajiban masing-masing.
- Keadilan di bidang ekonomi menuntut upah dan prestasi-prestasi sosial lain yang wajar bagi buruh, karyawan;
- bahwa yang diminta berkorban demi pembangunan diberi ganti rugi yang sesuai dengan nilai barang yang diambil;
- bahwa pembangunan menguntungkan semua, bahwa segenap masyarakat sama-sama beruntung daripadanya.
- Keadilan menuntut bahwa dalam penyelesaian tidak dipakai jalan kuasa atau kekerasan, melainkan jalan hukum dan hormat terhadap prosedur-prosedur hukum (negara hukum, keadilan legal).

3. PRINSIP HORMAT TERHADAP MARTABAT MANUSIA

Prinsip ini sentral dalam arti: Tingkat peradaban sebuah masyarakat diukur dari apakah semua warga tanpa kecuali dapat hidup sesuai dengan harkat kemanusiaan yang mereka terima dari Pencipta mereka, bahwa perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat itu tidak diizinkan dan tidak dibiarkan.

Dalam konteks sosial pasca-tradisional sarana yang menjamin hormat terhadap martabat manusia adalah hak-hak asasi manusia. Karena hak-hak asasi manusia mengungkapkan

segi-segi pada manusia yang perlu dijamin agar manusia secara kongkret-nyata diperlakukan sebagai manusia.

Maka pembangunan ekonomis baru berstatus etis apabila dijalankan dengan senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia segenap anggota masyarakat.

4. PRINSIP DEMOKRASI

Prinsip ini dalam UUD 1945 dimuat dalam kaidah kedaulatan rakyat dan mengenai bidang ekonomi terungkap dalam **Pasal 33**. Bagaimana prinsip itu dioperasionalisasikan, ditentukan dalam diskursus demokratis masyarakat ybs.

Sebagai prinsip, prinsip demokrasi perlu diterapkan pada pelbagai level kehidupan masyarakat. Di level kenegaraan prinsip ini mengatakan secara negatif, bahwa tidak ada orang, pangkat, golongan, elit atau kelompok mana pun yang dengan sendirinya berhak memutuskan nasib seluruh bangsa; secara positif, bahwa semua berhak berpartisipasi dalam penentuan arah perjalanan bersama dan bahwa mereka yang disertai kepemimpinan, melakukannya atas dasar perutusan masyarakat, berada di bawah kontrolnya serta memberikan pertanggungjawaban apabila diminta.

Di bidang ekonomi demokrasi tidak hanya berarti bahwa perekonomian harus menguntungkan bagi semua, melainkan bahwa semua pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kekhas-

an bidang serta keahlian masing-masing, ikut dalam pengambilan keputusan. Fahaman demokrasi ekonomi menyangkal bahwa di bidang produksi "pemilik modal" mempunyai hak eksklusif untuk memutuskan.

Di bidang masyarakat prinsip itu terungkap dalam pasal 28 UUD 1945; warga masyarakat dapat mengorganisasikan diri dengan bebas sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing - asal tetap dalam rangka keterikatan solidaritas bersama yang terungkap dalam Undang-undang Dasar. Di sini misalnya termasuk hak buruh membentuk serikat buruh.

5. PRINSIP TANGGUNGJAWAB

Prinsip ini dapat dianggap prinsip pengunci atau perangkum prinsip-prinsip lain. Prinsip ini mengatakan bahwa perekonomian dikembangkan sedemikian rupa hingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan terhadap tuntutan empat prinsip di atas. Tetapi juga terhadap kelestarian sumber daya alam, terhadap keutuhan lingkungan hidup, terhadap generasi yang akan datang yang berhak mewarisi bumi dalam keadaan yang tidak lebih buruk daripada keadaan pada waktu generasi kita mewarisinya. Pembangunan hanya dijalankan secara bertanggungjawab, apabila bersifat berkelanjutan.

Secara singkat, baik pembangunan perekonomian nasional, maupun masing-masing usaha ekonomis menengah dan mikro harus selalu berorientasi pada **tiga** wawasan:

- (1) Wawasan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia;
- (2) Wawasan kepentingan nasional yang terbuka bagi kepentingan bangsa-bangsa lain dan seluruh umat manusia;
- (3) Wawasan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kiranya sangat penting agama-agama menyadari bahwa sikap mereka terhadap pembangunan ekonomis jangan hanya melihat hal-hal yang langsung bersangkutan dengan hukum agama atau dengan moralitas individual (meskipun itu tentu juga penting, misalnya: perekonomian disusun sedemikian rupa hingga hidup kekeluargaan para buruh tidak terganggu, hingga anak tidak perlu dijual sebagai pelacur, dsb.), melainkan terutama memperhatikan moralitas atau etika perekonomian dalam seluruh wawasannya. Yaitu sebagai **pendukung kehidupan masyarakat** yang secara optimal memungkinkan manusia dapat mengembangkan diri secara utuh dalam dimensi-dimensi kemanusiaannya, sesuai dengan kekayaan kodrat kemanusiaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Agama-agama sebagai penjaga dan perintis kualitas kemanusiaan pembangunan ekonomis.

Maka agama-agama harus mengangkat suara bukan hanya, sebagaimana sudah menjadi tradisi, dalam kasus moralitas individual terancam, melainkan di mana saja martabat manusia pemberian rahmat Tuhan terasa terancam.

Dengan terus-menerus menyuarakan etika perekonomian, agama-agama tidak mencampuri bidang ekonomi, seakan-akan mengklaim suatu kompetensi khas ekonomis. Dukungan mereka terhadap pembangunan ekonomis adalah dengan terus-menerus mengingatkan koordinat-koordinat etika. Perekonomian yang dirasakan adil, yang mengungkapkan solidaritas seluruh bangsa, yang sesuai dengan martabat manusia dan kehendak masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan ke masa depan dengan sendirinya akan mendapat dukungan masyarakat. Dan agama-agama tidak membenarkan warganya malas-malas atau abstain dari bidang ekonomi. Justru kalau perekonomian semakin sesuai dengan cita-cita kewajaran etis, agama dengan tekanan pada pekerjaan tanpa pamrih, kesediaan untuk membantu sesama, dan tanggungjawab satu sama lain menjadi pendukung pembangunan yang sangat efektif. ■

